

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini berisikan tentang tulisan peneliti mengenai simpulan dan rekomendasi dari penelitian yang berjudul “Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966”. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti yang sebelumnya diajukan. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibuat peneliti meliputi latar belakang organisasi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) didirikan tahun 1952-1959, proses pembentukan organisasi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) (1952-1966), Operasi militer apa saja yang melibatkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) tahun 1959-1966, dan profil para komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) (1959-1966). Selanjutnya rekomendasi pada bab ini ditulis guna memberi sumbangsih masukan kepada pihak-pihak yang kiranya membutuhkan hasil penelitian.

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV, penelitian ini dapat disimpulkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) adalah pasukan khusus Angkatan Darat yang mempunyai sejarah panjang. Dalam perjalanannya pasca kemerdekaan Indonesia yang belum memiliki Angkatan bersenjata dan juga kebutuhan pasukan khusus yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki pasukan khusus. Karena keadaan Indonesia masih belum stabil, pada tahun 1950-an banyak terjadi gerakan sparatis yang ingin mendirikan negaranya sendiri. Melihat kondisi negara yang sedang terancam dengan maraknya pemberontakan membuat pemerintah mau tidak mau harus melakukan operasi militer yang menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Dari evaluasi operasi militer tersebut memunculkan ide pembentukan pasukan khusus. Pasukan khusus yang berjumlah sedikit tetapi memiliki mobilitas tinggi serta efektif dalam menjalankan operasi. Tetapi sebelum terwujudnya pembentukan pasukan khusus Slamet Riyadi yang

merupakan orang yang memiliki ide untuk membentuk sebuah pasukan khusus gugur dalam melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Maka pembentukan pasukan khusus belum dapat terwujudkan.

Akibat kebutuhan pasukan khusus sangat diperlukan maka Alex E. Kawilarang yang merupakan salah seorang yang ingin merealisasikan pembentukan pasukan khusus secara permanen. Karena pada saat penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) belum terbentuk, tetapi pada saat Alex E. Kawilarang menjabat sebagai panglima TT III/Siliwangi di hadapan pada pemberontakan DI/TII Jawa Barat yang di pimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontak DI/TII Jawa Barat melakukan tindakan-tindakan teror, pembakaran kampung-kampung, pembunuhan rakyat Jawa Barat yang tidak berdosa dilakukan gerombolan DI/TII. Para pemberontak memiliki daya gerak tinggi dalam menjelajahi medan gerilya, sehingga menyulitkan bagi pasukan Siliwangi dan TNI lainnya dalam melaksanakan operasi militer di lapangan.

Oleh karena itu tidak menunggu lama lagi Alex E. Kawilarang segera membentuk satuan yang memiliki kemampuan khusus Komando di lingkungan TT III/Siliwangi. Yang diberi nama Kesatuan Komando Tentara dan Teritorium III disingkat Kesko TT III. Kemudian beberapa Perwira, Bintara, Tamtam di lingkungan TT III/ Siliwangi dimasukkan ke dalam Kesko TT III yang sebagian diantaranya mendapat tugas rangkap sebagai pelatih. kemudian Alex E. Kawilarang meminta bantuan dari Mayor Rokus Bernardus Visser alias Moch. Idjon Djanbi yang merupakan mantan tentara Belanda yang menjadi warga negara Indonesia, lalu Moch Idjon Djanbi ditunjuk oleh Alex untuk menjadi Komandan Kesko III/Siliwangi.

Kedua, pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia mulai terbentuk akibat dilatar belakangi dinamika politik-militer dalam negeri. Keperluan menjaga pertahanan dan keamanan pemimpin TNI AD mengeluarkan surat perintah untuk membentuk pasukan khusus yang cakupannya Nasional. Maka kedudukan satuan komando yang awalnya di pegang oleh TT III/Siliwangi di ambil alih langsung oleh KSAD. Kemudian menindak lanjuti perintah tersebut dikeluarkanlah Surat keputusan KSAD No. 3/KSAD/KPTS/53 pada tanggal 14 Januari 1953 menetapkan bahwa Kesatuan Komando Teritorium dan Tentara III/ Siliwangi dialih statuskan

dari panglima TT III/Siliwangi kepada KSAD. Kemudian namanya diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat disingkat KKAD.

Sementara itu KKAD semakin mengembangkan organisasinya untuk melaksanakan beban tugas yang semakin meningkat, baik dalam tangkap tugas operasi maupun tugas Pendidikan dan latihan. Upaya ini memperoleh dukungan berkat semakin banyaknya personel KKAD yang memiliki kualifikasi komando. Pada tahun 1955 KKAD ditingkatkan dan diresmikan menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD). Demi kelancaran fungsi Pendidikan komando disamping tugas-tugas tempur, maka dibentuklah sebuah wadah Pendidikan organisasi RPKAD yang diberi nama Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat (SPKAD). Pada upacara peresmian ditunjuk sebagai komandan RPKAD yaitu Mayor Idjon Djambi dan wakil komandan Mayor. R.E Djaelani.

Beberapa bulan setelah pergantian tersebut situasi politik di Indonesia memanas. Ideologi politik sampai masuk kedalam lingkungan prajurit Angkatan Darat. Termasuk para perwira yang sepaham dengan Kolonel Lubis untuk memberontak dan Mayor R.E Djaelani sepaham dengan Kolonel Lubis, tetapi para banyak para perwira RPKAD yang tidak terpengaruh dan mereka bergabung dengan tentara Divisi Siliwangi untuk memberantasnya. Oleh karena itu peristiwa tersebut diknal sebagai peristiwa keranji. Dengan peristiwa tersebut komandan RPKAD diganti oleh Mayor Kaharudin Nasution. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1958 dilaksanakan pergantian pimpinan RPKAD dari Mayor Kaharudin Nasution kepada Letkol Moeng Parhadimulyo pergantian pimpinan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mempermudah mengendalikan tugas dalam operasi militer.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1959 dengan dilengkapi kemampuan para pada semua pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Maka secara organisasi dirubah nama dari istilah “pasukan” menjadi “para” sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadi perubahan dari Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat disingkat dengan RPKAD. Demikian juga dengan Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat dirubah menjadi Sekolah Para Komando Angkatan Darat (SPKAD). Lalu pada bulan Januari 1965 terjadi pergantian kembali kepemimpinan RPKAD Letkol Moeng Parhadimulyo mendapatkan tugas baru di SUAD, sehingga

jabatan Komandan RPKAD diserahkan terimakan kepada Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan.

Ketiga, sebagai pasukan khusus RPKAD tentunya memiliki tugas untuk menjalankan operasi militer salah satunya operasi militer yang pernah dilaksanakan oleh RPKAD dalam kurun waktu 1959 sampai dengan 1966 yaitu, operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 memutuskan bahwa Belanda bersedia mengakui kedaulatan Negara RI dengan catatan Irian Barat akan diserahkan dalam waktu satu tahun kemudian. Tampak tanda-tanda bahwa Belanda berkeinginan besar untuk tetap menguasai Irian Barat. Masalah ini menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1951-1952 merupakan masa diplomasi dalam usaha merebut Irian Barat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menggunakan kekuatan militer. Kemudian pada 16 Agustus 1962 persetujuan New York di tandatangani dan seluruh daerah Republik Indonesia di Irian Barat akhirnya diserahkan kembali ke Republik Indonesia dengan melalui perundingan.

Kemudian operasi Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) merupakan suatu kebulatan tekad politik konfrontasi terhadap pembentukan negara federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Pembentukan Unifikasi Malaysia menjadi pemicu pertikaian Indonesia dengan Malaysia. Soekarno beranggapan pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neo-kolonialisme (Nekolim) Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia atau lebih dikenal dengan persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961 Federasi Malaysia menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak kedalam wilayahnya. Hal ini tidak sesuai dengan Persetujuan Manila, maka keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai “boneka Inggris” yang merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Kemudian cara penyelesaian konfrontasi tersebut dengan keluarnya Surat perintah 11 Maret, maka Indonesia menempuh penyelesaian persengketaan dengan persengketaan dengan

Malaysia secara damai dan terhormat. Usah tersebut melahirkan adanya Jakarta *Accord* pada tanggal 11 Agustus 1966.

Selanjutnya operasi penumpasan Gerakan 30 September/ PKI merupakan suatu gerakan yang ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berideologi Komunis. Gerakan 30 September/PKI di pelopori oleh Letnan Kolonel Untung Komandan Batalyon Kawal Kehormatan Istana Resimen Cakrabirawa. Gerakan tersebut diawali dengan penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat seperti Letjend Ahmad Yani, Brigjend D. I. Pandjaitan, Mayjend Suprpto, Mayjend Harjono M. T., Brigjend Sutojo, Mayjend S. Parman, tetapi usaha penculikan terhadap Menko Hankam/Kasab Jenderal A. H. Nasution gagal. Dalam hal ini juga Letkol Untung menyiarkan bahwa terbentuknya dewan Revolusi Indonesia. Bagi kalangan militer pengumuman tersebut merupakan berita yang dinilai sangat aneh. Seketika itu kesatuan-kesatuan militer di Jakarta mulai menganalisa keadaan dan mengambil tindakan siaga. Kemudian karena dianggap mengancam kesatuan dan persatuan NKRI gerakan tersebut dianggap sebagai pemberontakan. Tetapi berkat kesigapan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat dan instansi lainnya yang anti PKI membuat pemberontakan tersebut dapat di patahkan. Sepintas keadaan di Jakarta berhasil dikuasai dan diamankan, namun kondisi yang sebenarnya terutama di daerah-daerah menjadi tidak terkendali dan menjadi sangat rumit. Setelah ditegaskan oleh Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto bahwa Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, seakan-akan memberi legalitas untuk menumpas PKI. Akibatnya terjadilah pembersihan unsur-unsur PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali

5.2 Rekomendasi

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti berjudul Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966. Skripsi yang ditulis merupakan suatu kajian sejarah militer yang berkaitan dengan topik tentang operasi militer di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sejarah, umumnya pada sejarah militer di Indonesia. Terutama memiliki kegunaan bagi

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tema yang sama, namun dengan judul dan bahasan yang berbeda.

Dalam pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya kelas XII sejarah wajib dengan Kompetensi Dasar 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 mata pelajaran sejarah pada kurikulum 2013 tentang disintegrasi bangsa pada masa pasca kemerdekaan Indonesia sampai orde baru. Siswa juga dapat belajar tentang situasi dan kondisi militer Indonesia pada masa itu, terlebih tentang terbentuknya pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia.